

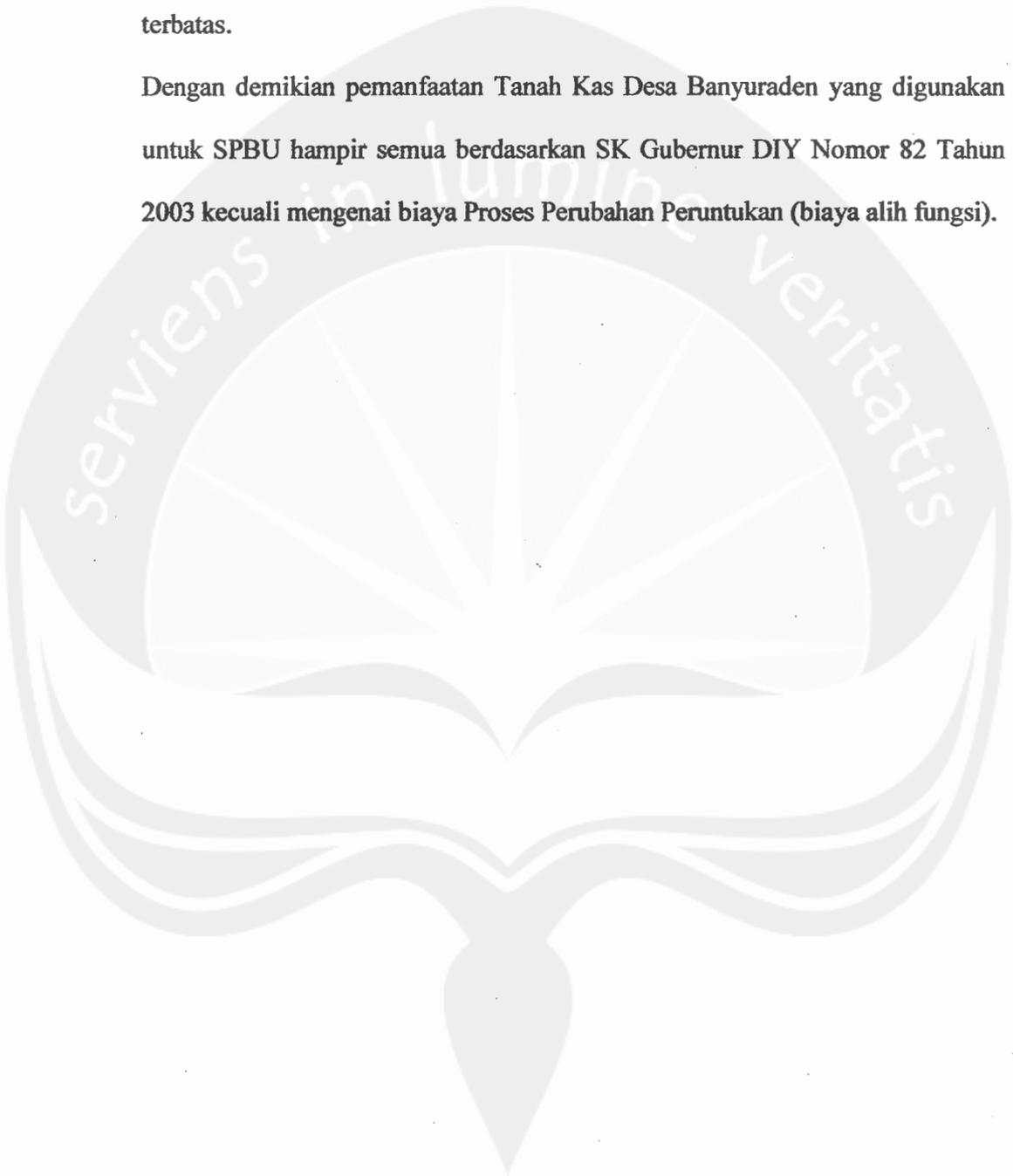
### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Tanah Kas Desa di desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman untuk SPBU setelah berlakunya Pasal VI Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto SK Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 telah dikonversi menjadi Hak Pakai atas Tanah Negara dengan subyek tanah kas desa Pemerintah Desa Banyuraden. Tanah kas desa disewakan kepada investor untuk didirikan SPBU. Sewa tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping dengan Saudara Dwi Tjahjono HS, SH, MM Nomor 02/LD/BNR/VIII/2003 yang memuat tentang kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa. Karena tanah kas desa tersebut pada awalnya merupakan tanah sawah, maka tanah kas desa tersebut harus diubah penggunaannya (alih fungsi) dari tanah pertanian menjadi non pertanian. Berdasarkan Pasal 13 SK Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 ditentukan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menanggung biaya Proses Perubahan Peruntukan dan Pensertipikatan Tanah Kas Desa, tetapi dalam sewa menyewa Tanah Kas Desa Banyuraden yang digunakan untuk SPBU, perubahan peruntukan tanah kas desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa

dengan Investor dilakukan oleh Investor karena keuangan Desa Banyuraden terbatas.

Dengan demikian pemanfaatan Tanah Kas Desa Banyuraden yang digunakan untuk SPBU hampir semua berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 kecuali mengenai biaya Proses Perubahan Peruntukan (biaya alih fungsi).



## DAFTAR PUSTAKA

Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 1981, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.

J. Sembiring, 2004, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, Widya Bumi No. 16 Tahun 5, Yogyakarta.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo 1953, *Desa*, Yogyakarta.

Mr. Ter har Bzn, *Asas-Asas dan Susunan hukum Adat*, 1983, Pradnya Paramita, Jakarta

Muhammad, Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Sudiyat, Iman, 1981, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah kas Desa.

**Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa.**

**Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.**

**Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.**

**Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Di Propinsi Daerah Istimewa, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**